

C. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**1. URUSAN KETENAGAKERJAAN**

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi.

a. Alokasi Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan pagu anggaran sebesar **Rp10.527.409.220,00 atau 0,508%** dari total APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 yang berjumlah **Rp2.072.393.505.735,00**. Alokasi anggaran untuk urusan ketenagakerjaan terealisasi sebesar Rp9.495.990.901,00 atau terserap 90,20% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Program dan realisasi anggaran untuk Urusan Ketenagakerjaan terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.C.1. 1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	5.039.866.900,00	4.848.366.569,00	96,20
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	421.431.000,00	409.277.500,00	97,12
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.951.200,00	140.695.011,00	98,42
3.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.759.177.000,00	3.630.824.375,00	96,56
4.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	232.652.800,00	211.200.873,00	90,78
5.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	483.654.900,00	456.368.810,00	94,36
B	Belanja Tidak Langsung	5.487.542.320,00	4.647.624.332,00	84,69
1	Belanja Pegawai	5.487.542.320,00	4.647.624.332,00	84,69
	Jumlah Total	10.527.409.220,00	9.495.990.901,00	90,20

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo diolah, 2018

b. Program dan Kegiatan**1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Pelaksanaan program ini diarahkan pada upaya untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional, dengan indikator sasaran berupa Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional.

IV.C.1.Urusan Pilihan Ketenagakerjaan

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari misi kedua Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu: meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan sektor industri yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dengan capaian indikator program ialah persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi. Pencapaian sasaran strategis ini, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional, yang ditempuh melalui strategi yaitu Perbaikan tata kelola lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan serta pengelola lembaga pelatihan, perluasan kesempatan dan akses pelatihan kerja, Peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, serta meningkatkan peran dan fungsi BLK dalam penyiapan tenaga kerja siap pakai, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia industri guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan industri dan penempatan tenaga kerja. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program ini, pada tahun 2018 dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja, kegiatan Revitalisasi Balai Latihan Kerja, kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill, kegiatan Pendampingan Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi eks Buruh Migran dan Keluarga, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi, kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, kegiatan Pelatihan Tata Boga, Kegiatan Pelatihan Sablon, kegiatan Pelatihan Service HP, kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor, Las dan Komputer bagi Pemuda Angkatan Pencari Kerja, kegiatan Pelatihan Peningkatan Skill bagi Pemuda Mandiri Membangun Desa Kabupaten Wonosobo, kegiatan Pelatihan Life Skill bagi Pemuda Putus Sekolah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Wanita, kegiatan Rehabilitasi Gedung Pelatihan BLKLN dan Pariwisata, kegiatan Pelatihan Pembuatan Tas Rajut Tingkat Lanjut, kegiatan Pelatihan Ketrampilan Las di Kecamatan Kaliwiro, kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Muda, kegiatan Pelatihan Manajemen dan Keuangan Industri Kecil, kegiatan Pelatihan Intensifikasi Pengolahan Produk Kopi, kegiatan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan IKM, kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Kelompok Rentan, kegiatan Pelatihan Skill Perempuan Produktif Industri Konveksi, kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi Perluasan Kesempatan Kerja, Kegiatan Pelatihan Skill bagi Organisasi Masyarakat di Kabupaten Wonosobo, kegiatan Fasilitas Industri Jasa bagi Pemuda Putus Sekolah, kegiatan Bantuan Kelompok Pelatihan

Membuat Pelet Ikanserta kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bambu Cendani Desa Serang Tambi.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Melalui program ini diharapkan dapat membuka, menciptakan dan meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, serta meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja (upaya preventif) melalui kegiatan pengembangan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan informasi pasar kerja, penyiapan tenaga kerja siap pakai, dan pembinaan dan pengembangan BKK, LPK dan PPTKIS. Selain itu, melalui pengembangan pasar kerja diharapkan juga memudahkan para pencari kerja untuk mendapat informasi peluang lapangan kerja sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Berbagai kegiatan dalam program ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok kegiatan, yaitu : kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai, kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan, kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja. Pengembangan pelayanan informasi pasar kerja bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kesempatan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bursa kerja (*job fair*). kegiatan bursa kerja (*job fair*) dilaksanakan dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan pada satu waktu dan tempat yang sama sehingga masyarakat pencari kerja dimudahkan dalam memperoleh informasi lowongan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pameran bursa kerja atau Job Fair. Kegiatan ini menjadi strategis dan menjadi magnet bagi pencari kerja maupun perusahaan calon pengguna tenaga kerja, karena kegiatan ini menjadi ajang bertemunya pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan) secara langsung, sehingga kedua pihak merasakan manfaat langsung. Melalui kegiatan ini informasi pasar kerja bisa tersebar luas, sekaligus memperluas kesempatan penempatan tenaga kerja pada dunia usaha dan dunia industri.

Selain kegiatan tersebut diatas juga di laksanakan kegiatan Peningkatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Kegiatan ini adalah jenis kegiatan untuk mengakomodasi pelayanan umum kepada masyarakat yang akan mencari pekerjaan di luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, kegiatan ini juga melakukan pelayanan bagi penempatan lokal dalam Kabupaten dan pembuatan Kartu AK-I (Kartu Pencari Kerja). Layanan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan bentuk layanan penempatan bagi tenaga kerja, baik melalui penempatan AKL, AKAD maupun AKAN, melalui serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi proses penempatan tenaga kerja yang prosedural, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran penempatan tenaga kerja. Sosialisasi ini dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Wonosobo yang menjadi kantong tenaga kerja AKAD dan AKAN. Di samping itu dilaksanakan monitoring penempatan tenaga kerja AKAD pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Salah satu isu strategis bidang ketenagakerjaan adalah masalah hubungan industri dan perlindungan hak-hak buruh/pekerja. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ketenagakerjaan, salah satunya ditujukan pada upaya penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan, serta Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksudkan untuk memberi kontribusi nyata pada upaya pencapaian tujuan tersebut di atas. Program ini dilaksanakan dalam lima bentuk kegiatan yaitu fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Fasilitasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten, peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja serta kegiatan Fasilitasi Penerapan Syarat Kerja Non-Diskriminatif. Penerapan syarat kerja non diskriminatif ialah penempatan pekerja tanpa membedakan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, asal-usul sosial bahkan keyaninan politik yang berakibat pada mengurangi persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan. Lebih lanjut, istilah "pekerjaan" ini meliputi juga kesempatan mengikuti pelatihan ketrampilan, memperoleh pekerjaan dan jabatan.

Pada tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi melalui kegiatan Fasilitasi Penerapan Syarat Kerja Non Diskriminatif telah membina 40 perusahaan agar menerapkan syarat kerja non diskriminatif. Selain itu, melalui kegiatan ini telah memetakan 180 perusahaan berdasarkan tingkat kerawanan perusahaan dalam menerapkan syarat kerja non diskriminatif.

Tabel IV.C.1. 2
Capaian Indikator Kegiatan Fasilitasi Penerapan Syarat Kerja Non Diskriminatif

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan Penerapan Syarat Kerja	40 perusahaan	40 perusahaan	100%
2	Jumlah peserta pemerataan kerawanan perusahaan	200 perusahaan	180 perusahaan	90%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

c. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 dapat terefleksikan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.C.1. 3
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian(%)	Status Capaian	
1	Persentase kepersertaan pekerja dalam jaminan perlindungan tenaga kerja	%	62.76%	50	72.37	144,74	0	80%
2	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan	%	100%	100	100	100	0	100
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif	%	79%	82	83	101,21	0	100
4	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun,	%		2	4	200	0	
5	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	57.81	53	60.34	113,85	0	60
6	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	%	57.46	71	69.57	97.99	◇	75
7	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	14.8	6	20.8	346,67	0	15
8	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	23	15	11.2	74.67	●●●	23
9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	18.75	12.5	23.1	184,8	0	
10	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional	%	0	4	8.33	208,25	0	
11	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	60.42	49.24	63.78	129,53	0	55
12	Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	%	16%	17	12%	70.59	●●●	30
13	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	23	15	11.2	74.67	●●●	30
14	Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wira usaha	%	0	5	3	60	●●●	20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $\geq 80\%$ - 99,99%
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional; Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja; dan Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Tujuan meningkatnya kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja diukur dengan indikator tingkat produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja memberi gambaran tentang nilai rata-rata barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo dalam satu tahun. Semakin produktif tenaga kerja, maka akan semakin besar memberi kontribusi terhadap PDRB. Pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja di Kabupten Wonosobo sebesar Rp31.482.245,00. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja mampu menghasilkan barang atau jasa senilai Rp31.482.245,00 selama tahun 2018.

Salah satu indikator penting dalam urusan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2018 tercatat dari 588.242 penduduk usia kerja, 426.625 orang diantaranya adalah angkatan kerja, atau 161.617 orang juga diantaranya bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Dari data tersebut dapat dihitung tingkat partisipasi angkatan kerjanya sebesar 72,53, artinya dari 100 penduduk usia kerja, 72 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktifitas ekonomi. Semakin besar TPAK berarti semakin tinggi persentase penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam aktifitas ekonomi (menghasilkan barang dan atau jasa). Capaian TPAK tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,37. Penurunan TPAK ini bisa bermakna positif, jika disebabkan oleh semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang melanjutkan pendidikan terutama bagi penduduk pada awal usia kerja.

Sementara itu, pada tahun 2018 dari 426.625 angkatan kerja, 17.353 orang diantaranya adalah penganggur terbuka. Hal ini berarti Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 berada pada angka 4,07% lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,18% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%.

Guna mewujudkan pencapaian ketiga sasaran tersebut, pada tahun 2018 urusan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo melaksanakan tiga program, yaitu: Program Perlindungan dan Pengembangan

IV.C.1. Urusan Pilihan Ketenagakerjaan

Lembaga Ketenagakerjaan, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Keberhasilan pelaksanaan ketiga program tersebut dilihat dari capaian indikator setiap program.

Sasaran Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan adalah meningkatnya kualitas hubungan industrial dengan indikator persentase sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan dan meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan indikator persentase kepersertaan pekerja dalam jaminan perlindungan tenaga kerja. Sementara itu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai sasaran meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dengan indikator program Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi. Sedangkan Program Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai sasaran meningkatnya kesempatan kerja, dengan indikator program Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

Selama kurun tahun anggaran 2018, setiap kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator program, dan indikator RKPD yang telah ditetapkan. Setidaknya terdapat 14 indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian urusan ketenagakerjaan seperti disajikan pada tabel di atas.

Indikator pertama, yaitu persentase kepesertaan pekerja dalam program jaminan perlindungan tenaga kerja. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada indikator Persentase Kenaikan Kepesertaan Pekerja Dalam Program Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja terjadi kenaikan persentase kepesertaan pekerja pada jaminan kesehatan/sosial sebesar 9,61% dimana pada tahun 2017 tercatat 62,76% pekerja yang telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan pada tahun 2018 terdapat 72,37% pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh semakin banyak pekerja yang mengetahui tentang manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Capaian kepesertaan pekerja dalam program perlindungan tenaga kerja ini telah jauh melampaui target capaian tahun ini, meskipun masih jauh dari ideal yaitu seluruh pekerja terdaftar dalam kepesertaan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Untuk itu perlu upaya terobosan untuk mempercepat tercapainya kondisi ideal dengan terus mendorong keterlibatan aktif perusahaan untuk memenuhi hak pekerja termasuk dalam keikutsertaan pekerja sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja akan lebih terjamin yang akan mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik investor masuk ke Wonosobo.

Untuk mencapai hal tersebut, upaya penyelesaian sengketa pengusaha – pekerja menjadi salah satu perhatian bagi Kantor Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, mengingat pentingnya menjaga situasi dunia usaha yang kondusif, dan pentingnya kepastian penyelesaian sengketa secara adil dan bermartabat bagi kedua belah pihak, yang difasilitasi melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terdapat

empat sengketa pengusaha –pekerja, dan semua sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja merupakan suatu program dalam urusan ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui serangkaian intervensi kegiatan berupa pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, sehingga dengan bekal ketrampilan yang dimilikinya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan baik sebagai karyawan pada perusahaan maupun dengan berusaha mandiri. Indikator kinerja berupa : persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat, persentase peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi, persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, persentase instruktur bersertifikat kompetensi, persentase lembaga kursus dan pelatihan bersertifikatnasional, persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan, persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan.

Pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah pelatihan berbasis kompetensi, yaitu pelatihan yang berpedoman pada SKKNI (Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia) dengan pelatihan ini diharapkan peserta mampu mencapai standar kompetensi sehingga peserta bisa mendapatkan manfaat dari kemampuannya tersebut baik dengan bekerja pada dunia industri maupun dengan berwirausaha. Capaian indikator Persentase Angkatan Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun 2018 sebesar 60,34% artinya terdapat 60 orang dari 100 orang pendaftar pelatihan yang bisa mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya (2017) sebesar 57,81% . Hal ini terjadi karena besarnya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan belum sebanding dengan fasilitas yang tersedia.

Salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan adalah masalah terbatasnya akses keluarga miskin atas berbagai fasilitas baik akses pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, akses terhadap sumberdaya ekonomi, termasuk terbatasnya akses mendapatkan pekerjaan dan pelatihan kerja yang memungkinkan meningkatnya ketrampilan sehingga terbuka peluang lebih untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maka indikator persentase warga miskin yang mendapat pelatihan menjadi salah satu indikator penting untuk membantu warga miskin membuka peluang terlibat aktif dalam aktifitas ekonomi setelah mendapat pelatihan kerja. Untuk indikator persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ditunjukkan pada tabel di atas, terlihat baru 11.2% dari peserta pelatihan merupakan warga miskin. Angka ini masih di bawah target kinerja tahun 2018 sebesar 15%, dan capaian ini perlu mendapat perhatian sehingga kegiatan harus terus ditingkatkan dengan memperbesar porsi peserta pelatihan bagi warga miskin.

Kualitas instruktur, yang antara lain diukur dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki, menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas lulusan pelatihan. Oleh karena itu upaya untuk memperbaiki kualitas instruktur terus dilakukan antara lain dengan

IV.C.1. Urusan Pilihan Ketenagakerjaan

mendorong instruktur mengikuti sertifikasi, dan hal ini menjadi salah satu indikator kinerja, yaitu persentase instruktur yang bersertifikat kompeten. Tabel di menunjukkan capaian indikator ini sebesar 23,1% dimana dari 13 instruktur 3 diantaranya telah bersertifikat kompeten, yaitu 2 orang instruktur pada kejuruan otomotif dan 1 orang pada kejuruan menjahit.

Salah satu indikator penting dalam penempatan tenaga kerja adalah peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan, yang tahun ini capaian kinerjanya adalah sebesar 12persen, menurun dibanding capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 16 persen. Pada tahun 2017 terdapat 29 perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan, sedangkan pada tahun 2018 terdapat tambahan kerjasama dengan 3 perusahaan dibanding tahun sebelumnya. Bertambahnya kerjasama penempatan tentu berdampak pada persentase penempatan tenaga kerja terdaftar. Pada tahun ini tingkat penempatan tenaga kerja sebesar 63.78 persen, melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 60.42 persen. Tetapi Capaian Tahun 2018 belum mencapai target karena baru tercapai 70,59% dibandingkan dengan target tahun 2018 yang sudah ditetapkan. Capaian ini perlu mendapat perhatian untuk terus melakukan upaya meningkatkan kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.C.1. 4
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Ketenagakerjaan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Desain produk pelayanan yang belum berorientasi ke pelanggan (<i>customer oriented</i>) membuat layanan kepada masyarakat terutama para pencari kerja menjadi tidak optimal.	Perlu dukungan tenaga dan sistem informasi yang terkomputerisasi, bank data yang terpusat serta menghasilkan informasi yang akurat dan <i>up to date</i> sehingga pelayanan kepada masyarakat terutama para pencari kerja bisa lebih optimal.
2.	Kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan kerja belum sesuai dengan kebutuhan pencari kerja dan permintaan pasar kerja	Meningkatkan kualitas tata kelola Balai Latihan Kerja dan perbaikan sarana prasarana pelatihan kerja, serta meningkatkan kualitas instruktur
3.	Masih terbatasnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta ketidaksesuaian peluang kerja yang ada dengan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh para pencari kerja.	Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta melakukan pendampingan, motivasi, serta pembekalan pengetahuan dan ketrampilan bagi para pencari kerja melalui program kerjasama dengan

IV.C.1. Urusan Pilihan Ketenagakerjaan

No	Permasalahan	Solusi
		berbagai perusahaan dibidang pendampingan persiapan masuk dunia kerja.